

TESIS

**PENYIMPANGAN PEMIDANAAN TERHADAP KETENTUAN PIDANA
MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015**



Oleh:

JOHN FRANKY YANAFIA ARIANDI, S.H.
NIM. 032014153047

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PENYIMPANGAN PEMIDANAAN TERHADAP KETENTUAN PIDANA
MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**JOHN FRANKY YANAFIA ARIANDI, S.H.
NIM. 032014153047**

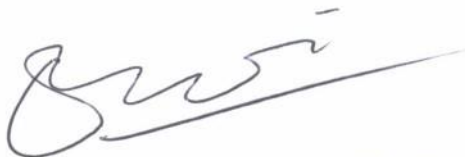
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui
Tanggal 31 Mei 2022

Oleh :

Dosen Pembimbing Pertama



(Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.)

NIP. 19680928 1997021001

Pembimbing Kedua



(Dr. ASTUTIK, S.H., MH)

NIP. 196803031992032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.

NIP. 19640107 198903 2001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 30 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : RIZA ALFIANTO, S.H.,MTCP.

Anggota : Dr. ASTUTIK, S.H.,M.H.,

Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H.,M.hum.

PRILIAN CAHYANI, S.AP.,M.H.,LL.M.

SAPTA APRILianto, S.H.,M.H.,LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Senin, 30 Mei 2022
Ruang : -
Pukul : 13.30. WIB
Nama Mahasiswa : John Franky Yanafia Ariandi, S.H.
Nim : 032014153047
Judul : Penyimpangan Pemidanaan Terhadap Ketentuan Pidana Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Mei 2022
Yang membuat pernyataan



John Franky Yanafia Ariandi, S.H.
NIM. 032014153047

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Kekuatan Mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Bagi Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Ratio Decidendi Putusan Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Sebagai aturan yang diperuntukkan ke jajaran peradilan, yang memiliki sifat mengikat ke dalam hanya pada jajaran peradilan namun tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat keluar dalam artian mengikat para penegak hukum pada instansi yang lain. SEMA bukan berbentuk peraturan/*regeling* yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus dilaksanakan, SEMA hanya sekedar bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Dasar pertimbangan Hakim yang mendasarkan rasa keadilan dan mengesampingkan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dalam tindak pidana narkotika dapat dibenarkan, sebab apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila dalam penerapannya terjadi benturan, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems in this thesis are: The Binding Strength of the Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2015 for Judges in Handling Narcotics Crimes and the Ratio Decidendi of Judges' Decisions in Handling Narcotics Crimes Implementing the Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2015.

SEMA Number 3 of 2015 is a form of circular from the leadership of the Supreme Court to all levels of the judiciary which contains guidance in the administration of justice, which is more administrative in nature. As a rule that is intended for the ranks of the judiciary, which has the nature of binding inward only to the ranks of the judiciary but does not have the power to bind it out in the sense of binding law enforcers to other agencies. SEMA is not in the form of regulations / regulations that are binding and have legal force that must be implemented, SEMA is only a guide in the administration of justice, which is more administrative in nature. The judge's basis of consideration based on a sense of justice and overriding legal certainty in imposing a criminal under the minimum threat limit specifically for narcotics crimes can be justified, because if there is a conflict between justice and legal certainty, justice should be prioritized over legal certainty. Justice and legal certainty are two legal objectives that are often inconsistent with each other and are difficult to avoid in legal practice and if in practice there is a conflict, the judge as far as possible should prioritize justice over legal certainty.

Keywords: *Criminal Imposition, Special Minimum, Narcotics Crime*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Penyimpangan Pemidanaan Terhadap Ketentuan Pidana Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen MKPT II;
5. Ibu Dr. Astutik, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II;
6. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
7. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;

8. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Mei 2022

John Franky Yanafia Ariandi, S.H.
NIM. 032014153047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.5.1. Pidana dan Pemidanaan.....	11
1.5.2. Konsep Tindak Pidana Narkotika	18
1.5.3. Konsep Pidana Minimum Khusus.....	20
1.6. Metode Penelitian	21
1.6.1. Tipe Penelitian	22
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	22
1.6.3. Bahan Hukum.....	23
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	24
1.7. Rencana Sistematika Penulisan.....	25

BAB II KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH

**AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 BAGI HAKIM DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

2.1.	Surat Edaran Mahkamah Agung.....	27
2.1.1.	Mekanisme Pembentukan SuratEdaran Mahkamah Agung.....	27
2.1.2.	Dasar Hukum Pembentukan SEMA	29
2.1.3.	Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	35
2.2.	Ancaman Pidana Minimal Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	40
2.3.	Kekuatan Mengikat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Bagi Hakim.....	43

**BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
MENERAPKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

3.1.	Bentuk Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili.....	50
3.1.1.	Independensi Hakim	50
3.1.2.	Bentuk Diskresi Hakim Dalam Penanganan Perkara Pidana.....	65
3.2.	Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim	81
3.2.1.	Asas Keadilan	81
3.2.2.	Asas Kemanfaatan	87
3.2.3.	Asas Kepastian Hukum.....	91
3.3.	Ratio Decideni Putusan Hakim Dalam Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.....	95
3.3.1.	Contoh Putusan	96
3.3.2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyimpangan Pidana Minimum Khusus	100

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	107
4.2. Saran	108

DAFTAR BACAAN